**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014**

Bali, 3-4 April 2014

**KESIMPULAN:**

1. Kualitas pengelolaan obat publik dan perbekkes akan meningkat dengan e-catalogue, e-logistic, dan sampling obat di instalasi farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota. Teknis implementasi e-catalogue perlu disempurnakan, aplikasi e-logistic akan diperbaiki dengan memperhatikan keunggulan e-barcode, dan perlu koordinasi yang lebih intens dengan Balai POM untuk sampling.
2. Peningkatan mutu alkes dimulai dari *need assessment* yang tepat, pengadaan alkes yang transparan-akuntabel melalui e-catalogue alkes, serta pemantauan pasca pemasaran melalui e-report dan e-watch alkes.
3. Implementasi Fornas ditujukan untuk menjamin terselenggaranya penggunaan obat yang rasional dan terkendalinya biaya pelayanan kesehatan. Pemantauan kesesuaian penggunaan obat menjadi bahan evaluasi penyempurnaan Fornas.
4. P4TO dan PED menjadi sarana pemanfaatan potensi kemandirian bahan baku obat, dengan partisipasi aktif antara Pusat dan Pemda dalam pengembangannya.
5. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dekonsentrasi serta DAK Subbid. Pelayanan Kefarmasian, diperlukan peningkatan kualitas dan kepatuhan pelaporannya.

**REKOMENDASI:**

1. Mendorong peran aktif Dinkes Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam implementasi e-catalogue, e-logistic, serta sampling obat, termasuk menyampaikan kendala yang dihadapi melalui saluran komunikasi yang disediakan.
2. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan e-catalogue, e-report, dan e-watch alkes, termasuk menjalin koordinasi dengan pengguna alat kesehatan, sehingga mewujudkan jaminan keamanan-mutu-manfaat produk yang beredar.
3. Mendorong pemanfaatan Fornas oleh pelayanan kesehatan, disertai pemutakhiran berkala terhadap muatan Fornas berdasarkan hasil evaluasi penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Perlunya sosialisasi peran setiap lintas sektor yang terlibat dalam pemanfaatan serta pengembangan P4TO dan PED. Dalam hal pelaporan SIPNAP, perlu dilakukan umpan balik hasil pelaporan dalam kebijakan yang terkait.
5. Mendorong peran aktif Kemenkes, Dinkes Provinsi, dan Dinkes Kabupaten/Kota, baik unsur administrasi (sekretariat), maupun unsur teknis, dalam menyampaikan laporan yang valid dan tepat waktu.
6. Pada tahun 2015, pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk Wilayah Timur dilaksanakan di Makassar.